

## EFEKTIVITAS ALOKASI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI KELURAHAN PURANGI KECAMATAN SENDANA KOTA PALOPO

Andi Ni'mah Sulfiani<sup>1</sup>, Kiki Reski<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andi Djemma Palopo  
email: [andi.nimah305@gmail.com](mailto:andi.nimah305@gmail.com)

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andi Djemma Palopo  
email: [kikireski.1510@gmail.com](mailto:kikireski.1510@gmail.com)

### Abstrak

Alokasi dana desa merupakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas alokasi dana Kelurahan Purangi Tahun Anggaran 2019. Untuk melihat sejauhmana efektifitas alokasi dana desa di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana, penulis menggunakan pengukuran efektifitas menurut lembaga pengawasan yang terdiri dari 3 aspek yaitu waktu pelaksanaan program kerja, ketepatan perhitungan biaya program kerja dan ketepatan sasaran tujuan program kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, survei, dokumentasi dan studi pustaka. Alokasi dana Kelurahan Purangi di fokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan plat duiker dan pembangunan rabat beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana Kelurahan Purangi Tahun Anggaran 2019 bisa dikatakan cukup efektif.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Alokasi Dana Kelurahan, Pembangunan Fisik

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana pelaksanaan pemerintahannya di bagi atas Daerah-Daerah yang terdiri atas Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah kota. UUD 1945 kemudian memberikan kekuasaan kepada Daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Otonomi Daerah di maksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Prasetyo, 2017)

Pada hakikatnya otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing Daerah, juga Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring

dengan bertambahnya luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di Daerah dapat mengelola dan peyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Faradisha, 2017:2). Salah satu penunjang dalam keberhasilan otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah mereka.

Salah satu pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara adalah Kelurahan/ Desa. Dalam Undang – Undang Tahun 2004, Kelurahan/ Desa di tempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam hal ini Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang di pergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma

pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan (Zulkarnain, 2018:104).

Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Kelurahan sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas, baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi Instansi Pemerintah secara terpadu (Abdurohman, 2011).

Kota Palopo merupakan salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Daerah otonom yang berstatus kota. Kota Palopo pada awalnya merupakan kota administratif yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 42 Tahun 1986 yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Daerah Otonom dan Palopo berdiri sendiri sebagai Daerah otonom. Diawal terbentuknya sebagai Daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Salah satu Kelurahan yang ada di Kota Palopo adalah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana dimana kelurahan ini yang akan menjadi objek penelitian saya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 15 tahun 2019 pasal 3, dalam rangka melaksanakan pembangunan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat dalam lingkup kerja Kelurahan, pemerintah Kota Palopo menganggarkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang biasa disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Palopo, Alokasi anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Kota Palopo No.15 Tahun 2019 Pasal 3, anggaran Kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan sarana dan prasaran yang dimaksud adalah pelayanan sosial seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi dan kesehatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan seperti pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kebijakan alokasi dana Kelurahan di harapkan dapat mendorong terlaksananya otonomi serta diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan Kelurahan dan masyarakat. Namun melihat beberapa hasil penelitian dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana Kelurahan, efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana Kelurahan lebih banyak berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dan lebih fokus pada pembangunan fisik ketimbang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masalah- masalah yang timbul dalam usaha pemberdayaan masyarakat tidak hanya berpusat pada Pemerintah Kelurahan tetapi juga dalam interes masyarakat Kelurahan. Kelurahan Purangi merupakan salah satu kelurahan di Kota palopo yang masih rendah tingkat pemberdayaan masyarakatnya, kendala yang sering dihadapi selain berasal dari pemerintah juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Jumlah dana Kelurahan di Kelurahan Purangi yang dialokasikan sangat kecil daripda kebutuhan yang mengakibatkan

alokasi dana lebih berfokus kepada pembangunan sarana dan prasarana ketimbang program pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang menjadi kendala adalah terlalu banyak program pemberdayaan yang diusulkan, tidak sesuai dengan dana anggaran yang tersedia yang menyebabkan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purangi tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu kami selaku peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai "Efektivitas Alokasi Dana Kelurahan T.A 2019 di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Alokasi dana Kelurahan tersalurkan dengan baik dan efektif dalam hal pembangunan sarana prasarana dan pelaksanaan program- program yang ada di kelurahan. Efektifitas dalam pengelolaan sebuah anggaran bisa dilakukan dengan mengaktifkan beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga alokasi dana tersebut dipergunakan sesuai dengan program- program kerja yang menjadi prioritas (Runi & Ferdian,2021)

Penelitian ini berfokus kepada sejauh mana efektifitas alokasi dana kelurahan. Dalam menjawab permasalahan tersebut kami menggunakan konsep pengukuran efektivitas pengelolaan dana Kelurahan menurut Makmur (2010) yaitu ;

1. Waktu pelaksanaan program kerja
2. Ketepatan perhitungan biaya program kerja
3. Ketepatan sasaran /tujuan program kerja

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

Informan dalam penelitian ini terdapat dua informan yaitu Informan kunci adalah Lurah, Sekretaris Kelurahan Purangi, Kepala Seksi sarana dan prasarana dan ketua pemberdayaan masyarakat Kelurahan Purangi dan Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung

dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat Kelurahan Purangi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yaitu peneliti melakukan pengamatan seperti apa kondisi lapangan dan pengalokasian dana kelurahan menurut para informan yang berada dilokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, perbedoman dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan indikator penelitian. Adapun Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil triangulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah otonom yang letaknya berbatasan langsung dengan Kecamatan Waleleng Kabupaten Luwu Utara, disebelah Timur dengan Teluk Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara. Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 Km dan secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan, salah satu Kelurahan yang terletak di Kota Palopo yaitu Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana. Kelurahan Purangi secara geografis terletak antara 3o3'15.79"S Lintang selatan dan 120o12'28.19"E bujur timur. Kelurahan Purangi secara administratif memiliki luas wilayah 5,41 Km2 terbagi menjadi 6 RW dan 12 RT, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.875 jiwa dengan jumlah laki- laki sebanyak 926 jiwa dan perempuan sebanyak 949 jiwa tercatat pada tahun 2021.

Program dalam pengalokasian dana Kelurahan Purangi T.A 2019 di fokuskan pada pembangunan sarana dan prasana yang terdiri dari 3 (tiga) item fisik yang menunjang kebutuhan masyarakat di Kelurahan Purangi. Pemerintah Kelurahan Purangi merealisasikan program dengan menelan total biaya sebesar Rp.

168.060.000,00. yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purangi. Pembangunan Drainase, pembangunan rabat beton dan pembangunan plat duiker di rasa sangat penting dan mendesak, hal ini dikarenakan kondisi akses transportasi di Kelurahan Purangi yang belum memadai sehingga dengan dibangunnya sarana dan prasarana tersebut, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kelurahan Purangi.

Dalam melaksanakan peraturan pemerintah terkait dengan alokasi dana Kelurahan atau alokasi dana umum yang telah di atur dalam undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan sejumlah dana kepada setiap daerah otonom sebagai dana pembangunan daerah yang disebut alokasi dana umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif pengelolaan alokasi dana Kelurahan Purangi dengan menggunakan beberapa indikator menurut Makmur (2010) yaitu sebagai berikut:

#### **Waktu pelaksanaan program kerja**

Pelaksanaan program alokasi dana Kelurahan , penentuan waktu dapat menentukan keberhasilan suatu program yang dilakukan. penentuan waktu yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan (Makmur, 2010). Berikut hasil wawancara dengan informan Bapak Abdi SE selaku Lurah Purangi mengenai perencanaan waktu pelaksanaan apakah pelaksanaan program alokasi dana dikerjakan tepat waktu , Beliau mengatakan bahwa :

*“Pelaksanaan program alokasi dana Kelurahan terbagi menjadi 3 item yaitu pembangunan drainase, pembangunan plat duiker dan rabat beton, ketiga pembangunan sarana dan prasarana dilakukan tepat waktu sesuai dengan perencanaan awal yang telah dirancang dan dikoordinasikan sebelumnya”.*

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja, Beliau mengatakan :

*“Sebelum proses pelaksanaan program kerja, pemerintah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pekerja mengenai waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Proses pembangunan dikerjakan kurang lebih sekitar 2 bulan yaitu dari tanggal*

*01 November 2019 – 31 Desember 2019 dengan 3 tahapan dan 3 item pembangunan.*

Peneliti menanyakan mengenai dalam proses pelaksanaan , apakah ada kendala yang dihadapi sehingga proses pengerjaan program menjadi terhambat, Beliau mengatakan :

*“Proses pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi memiliki kendala kurangnya dana alokasi pembangunan sementara kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan purangi masih banyak”*

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu Hj. Hardiati Saharuddin selaku kepala seksi pelayanan umum di Kelurahan Purangi, Beliau mengatakan :

*“Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi berjalan tepat waktu sesuai dengan yang telah di rencanakan, meskipun dalam pelaksanaan program kerja ada beberapa kendala yang dihadapi”*

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi :

*“kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi yaitu jumlah dana yang masih kurang sementara pembangunan masih banyak yang diperlukan selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses alokasi dana Kelurahan”*

Berdasarkan hasil penelitian, waktu pelaksanaan program alokasi dana kelurahan yaitu pembangunan drainase, pembangunan plat duiker dan pembangunan rabat beton sudah sangat efektif karna dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Waktu pelaksanaan program merupakan salah satu indikator yang sangat berperan penting dalam menunjang efektivitas dan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan, hal ini sejalan dengan pendapat Andriani, 2018 yang menyatakan bahwa apabila suatu program yang dilakukan sudah tepat waktu maka dapat dikatakan program tersebut efektif, namun jika waktu yang telah ditentukan tidak sesuai dengan realita lapangan bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak efektif. Dalam mencapai tujuan suatu program yang dijalankan harus memikirkan kurun waktu pelaksanaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.



### Perhitungan biaya program kerja

Ketepatan dalam perhitungan biaya merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengetahui efektif atau tidak suatu program yang dilakukan. Ketepatan sebuah organisasi dalam menggunakan dana yang artinya dalam proses pelaksanaan program tidak mengalami kekurangan dan juga tdk mengalami kelebihan sampai semua kegiatan selesai dilakukan (Baria, 2019). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdi SE, selaku lurah di Kelurahan Purangi mengenai dana yang diajukan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana, Beliau mengatakan :

*“Jumlah dana DAU yang diberikan pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp. 168.060.000,00 yang dikhususkan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan rabat beton dan pembangunan plat duiker, hal ini dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana tersebut dianggap penting dan mendesak. Dalam proses pengalokasian anggaran dana kelurahan pemerintah kelurahan Purangi juga melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat”*

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja program yang di alokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta rincian biaya setiap program, Beliau mengatakan :

*“Alokasi dana di bagi menjadi 3 item yaitu pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan drainase dan pembangunan plat duiker dengan 3 tahapan pencairan yaitu pencairan tahap I sebesar 67.224.000,00, pencairan tahap II sebesar 50.418.000,00 dan pencairan tahap III sebesar 50.418.000,00.”*

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu Hj. Hardiati Saharuddin selaku kepala seksi pelayanan umum mengenai bagaimana pemerintah kelurahan Purangi dalam pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana, Beliau mengatakan :

*“Pelaporan pertanggung jawaban setiap tahapan pencairan dana di buat laporan yang berisi surat pencairan dana, surat permintaan barang dan jasa, surat pertanggung jawab, kwitansi pembelian barang dan pelaporan perkembangan pembangunan”*

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah alokasi dana kelurahan T.A 2019 cukup untuk pembangunan sarana dan prasarana, Beliau mengatakan :

*“Alokasi dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan Purangi belum cukup, hal ini dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai”*

Selanjutnya peneliti menanyakan, bagaimana memanfaatkan alokasi dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana, Beliau mengatakan :

*“Pemerintah kelurahan Purangi sebelum merancang program kerja terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan mendengarkan pendapat masyarakat tentang pembangunan sarana dan prasarana yang di prioritaskan, mengingat jumlah dana yang terbatas”*

Berdasarkan hasil penelitian indikator perhitungan biaya merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu program, biaya yang telah direncanakan harus mencukupi untuk pelaksanaan suatu program kegiatan. Anggaran dana di Kelurahan Purangi masih sangat kurang untuk pembangunan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan masih banyak pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena jumlah anggaran yang tdk mencukupi, pemerintah kelurahan Purangi hanya memfokuskan pembangunan yang lebih prioritas sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal.

Selain itu anggaran dana T.A 2019 masih kurang dalam alokasi pembangunan drainase, pembangunan plat duiker dan pembangunan rabat beton. Menurut Gibson 1987 dalam Melati 2015 efisiensi merupakan bagian dari efektivitas yang menentukan keberhasilan suatu program yang dijalankan, efisiensi merupakan perbandingan antara pengeluaran dan masukan.

Anggaran dana Kelurahan Purangi T.A 2019 sebesar 168.060.000,00 yang dikhususkan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan rabat beton dan pembangunan plat duiker, namun setelah dilakukan pengerjaan selama 2 (dua) bulan terdapat penambahan biaya pengwasan dan perencanaan sebesar Rp. 8.410.500,00 sehingga total biaya pembangunan sarana dan prasana sebesar Rp. 176.470.500,00.

Ketepatan dalam memperhitungkan biaya dilaksanakan agar dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan sampai program itu selesai dilakukan, karena jika hal itu terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai dan mempengaruhi tingkat efektivitas

### Ketepatan sasaran /tujuan program kerja

Penentuan sasaran yang tepat merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu program yang dijalankan. Suatu kegiatan harus mempertimbangkan tujuan suatu kegiatan untuk membantu organisasi lebih sistematis dan terstruktur (Makmur, 2010). Sasaran dari setiap program yaitu dikatakan efektif apabila kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari program ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sasaran program hendaknya harus benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan (Adriani, 2018). Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan Bapak Wahyu selaku RT di Kelurahan Purangi mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi, Beliau mengatakan :

*“Program yang dilakukan di Kelurahan purangi juga melibatkan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembentuk kelompok masyarakat. Sebelum merancang program alokasi dana , pemerintah melakukan sosialisasi untuk mengetahui kebutuhan dan masukan masyarakat dengan pengembangan di kelurahan. Masyarakat Kelurahan Purangi juga memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan”*

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat setelah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi , Beliau mengatakan :

*“Manfaat yang dirasakan masyarakat setelah pembangunan sarana dan prasarana sangat baik, karena memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dan jalur transportasi yang lebih mudah di akses. Selain itu pembangunan drainase juga memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat”*

Selanjutnya Peneliti menanyakan apakah setelah program pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi, masyarakat lebih dapat mengembangkan diri , Beliau mengatakan :

*“pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehingga masyarakat juga lebih nyaman dalam menjalankan aktivitasnya dan lebih dapat mengembangkan diri dan membuka usaha”*

Hal serupa juga disampaikan informan bapak agus selaku masyarakat di Kelurahan Purangi , mengenai manfaat yang di peroleh dengan

adanya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi , Beliau mengatakan :

*“pembangunan drainase di kelurahan purangi memberikan manfaat kepada masyarakat karena dapat membantu mengurangi kelebihan air pada lahan pertanian atau sawah masyarakat selain itu pembangunan jalan rabat beton juga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari – hari krena lebih mudah dan lancar dalam berkendara”.*

Berdasarkan hasil penelitian indikator ketepatan sasaran merupakan salah satu aktor yang menunjang efektivitas suatu program yang dilaksanakan, dalam hal ini alokasi dana Kelurahan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan plat duiker, dan pembangunan rabat beton.

Pembangunan sarana dan prasarana ini di prioritaskan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat khususnya pada akses transportasi dan dalam melakukan pekerjaan. Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Purangi sudah sangat efektif , namun masih banyak pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat kedepannya. Menurut Makmur (2010) ketepatan sasaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu aktivitas organisasi, jika sasaran yang ditentukan kurang tepat, maka menghambat dan memperlama pelaksanaan dalam kegiatan tersebut.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas alokasi dana Kelurahan Purangi T.A 2019 dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- Efektivitas pelaksanaan alokasi dana Kelurahan Purangi pada indikator ketepatan waktu pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan rabat beton dan pembangunan plat duiker dinilai sudah efektif karena diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Efektivitas dengan ketepatan perhitungan biaya. Alokasi dana Kelurahan Purangi tidak efektif karena kekurangan dana anggaran selain itu pembangunan yang dinilai belum selesai sepenuhnya dilakukan karena anggaran yang terbatas.
- Efektivitas ketepatan sasaran dalam alokasi dana Kelurahan Purangi dinilai efektif karena pembangunan sarana dan

prasarana seperti pembangunan drainase, pembangunan rabat beton dan pembangunan plat duiker sangat dibutuhkan masyarakat di Kelurahan Purangi

- d. Berdasarkan ukuran waktu pelaksanaan, perhitungan biaya dan ketepatan sasaran, maka alokasi dana Kelurahan Purangi T.A 2019 cukup efektif.

#### Saran

Pelaksanaan alokasi dana Kelurahan Purangi kedepannya harus lebih spesifik dalam perincian anggaran sehingga penggunaan anggaran lebih efektif. Alokasi dana Kelurahan Purangi jangan hanya befokus pada pembangunan sarana dan prasarana tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat.

#### REFERENSI

- Abdurohman.2011. Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan TegalBunde Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Ilmu administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten
- Achlam, Steffi Melati dkk. 2015. Analisis Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Menggunakan Structural Equation Modeling. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri. Vol. 3 No. 1.
- Andriani,Rian. dkk. 2018. Strategi Promosi UMKM Kampung Rajut Binong Jati Sebagai Kawasan Wisata Belanja (Vol.1). JURNAL ABDIMAS BSI. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Baria,Khaerul. 2019. Efektivitas pelayanan kartu macca Di kecamatan lalabata kabupaten soppeng. Skripsi. Program studi ilmu administrasi negara Fakultas sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah Makassar
- Faradisha A. S. 2017. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Aak) Untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Miles, Matthew B. and A. Michael

Huberman, 2014, Qualitative Data Analysis (terjemahan), Jakarta : UI Press.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Prasetyo Dwi. N.Z., Pabalik.Dg., Bintari C.W. 2017. "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong", ejournal, 6(2) :42-43

Runi & Ferdian. 2021. Analisis Manajemen Pengelolaan dana Desa dalam Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jounal I La Galigo Public Administration Journal, 41-48

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Zulkarnain, M. 2018. Peran pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanoa Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 11(2) : 103-110)